

AGENDA KE DEPAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Secara makro, perekonomian Indonesia selama periode 2004–2013 tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut juga diiringi dengan laju inflasi yang cukup tinggi, sehingga pendapatan riil secara nasional tidak tumbuh secepat pertumbuhan pendapatan menurut harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia ternyata mempunyai dampak yang tidak dikehendaki, yaitu timbulnya senjang pendapatan per kapita yang semakin meningkat. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut lebih terkonsentrasi di Jawa, sehingga pemerataan pendapatan menurut wilayah pun juga cenderung semakin timpang.

Sumbangan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) cenderung menurun dari 12,24% pada tahun 2000, menjadi 10,59% pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi transformasi ekonomi nasional dari sektor pertanian sebagai sumber pendapatan nasional, menuju ke dominasi sektor nonpertanian sebagai sumber pendapatan.

Menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan industri perdesaan, yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana pertanian di kawasan timur Indonesia, serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor pertanian pada khususnya. Di samping itu, sehubungan dengan transformasi sumber pendapatan rumah tangga dari pertanian ke nonpertanian, petani di perdesaan perlu dipersiapkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk menganekaragamkan sumber pendapatan rumah tangga dengan mengembangkan kegiatan usaha lain yang lebih produktif.

Sejalan dengan data makro, data Patanas menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga di perdesaan meningkat, namun laju peningkatan pendapatan dari nonpertanian lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Struktur pendapatan rumah tangga khususnya di desa berbasis padi sawah masih didominasi oleh pendapatan dari pertanian, walaupun cenderung menurun. Sebaliknya, sumbangan pendapatan pertanian di desa berbasis sayuran cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pertanian sayuran yang mempunyai nilai tambah tinggi cukup berkembang sehingga menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga petani yang dominan. Namun, tidak demikian halnya yang terjadi pada desa yang berbasis lahan kering palawija. Pendapatan pertanian bagi rumah tangga perdesaan pada agroekosistem lahan kering palawija semakin tidak dominan dan juga tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari usaha dan kegiatan pertanian diperlukan dukungan teknologi untuk peningkatan produktivitas, serta kebijakan

yang memberikan insentif dan stabilitas harga bagi produksi hasil pertanian. Di samping itu, perlu untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di kegiatan nonpertanian.

Hasil analisis data Patanas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di daerah perdesaan dapat dikategorikan sedang hingga tinggi. Distribusi pendapatan di perdesaan berbasis padi sawah cenderung moderat, sedangkan distribusi pendapatan di desa berbasis sayuran cenderung tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah yang pendapatannya relatif tinggi cenderung mempunyai distribusi pendapatan yang kurang merata. Gejala ini juga konsisten dengan kondisi ketimpangan pendapatan rumah tangga hasil analisis data makro. Akses terhadap lahan pertanian produktif dan akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di perdesaan.

Sebenarnya petani mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatannya melalui diversifikasi usaha taninya. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya rumah tangga di desa-desa Patanas yang berusaha di bidang budi daya ternak yang dapat diintegrasikan dengan usaha tani tanaman. Nilai tambah usaha ternak sebenarnya dapat mendatangkan hasil sampingan berupa pupuk kandang, baik cair maupun padat yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan bagi rumah tangga peternak. Pemakaian pupuk kandang ini sebenarnya dapat menekan biaya produksi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Bantuan modal pinjaman berbunga ringan atau sistem dana bergulir (*revolving fund*) diperlukan agar rumah tangga peternak miskin mampu untuk memperbaiki kondisi ekonominya melalui usaha budi daya ternak.

Pertumbuhan ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada perubahan struktur pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan bukan pangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mengubah pola konsumsi pangannya. Data makro menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan di kedua wilayah ini secara ekonomi kebutuhan pangan sudah tidak terlalu membebani pengeluaran rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan perubahan pola konsumsi rumah tangga, paling tidak ada tiga masalah yang memerlukan perhatian untuk penanganan selanjutnya, yaitu (1) telah terjadi perubahan pola pengeluaran dari yang didominasi kelompok padi-padian dengan harga per unit kalori dan protein yang relatif rendah ke kelompok makanan jadi dengan harga per unit kalori dan protein yang semakin tinggi; (2) telah terjadi kenaikan skor PPH secara bertahap, tetapi mulai tahun 2011 skor PPH mulai menurun, yang menunjukkan bahwa keragaman dan kualitas konsumsi pangan menurun; dan (3) tingkat konsumsi beras dan umbi-umbian cenderung menurun digantikan oleh konsumsi terigu, yang berarti bahwa masyarakat semakin tergantung kepada sumber energi dari pangan eks impor.

Terkait dengan penurunan kualitas konsumsi masyarakat, pemerintah perlu melakukan perluasan dan percepatan program diversifikasi pangan menjadi suatu gerakan nasional untuk meningkatkan keragaman konsumsi dan peningkatan

kualitas gizi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal, serta mengurangi ketergantungan pada pangan eks impor. Diperlukan upaya peningkatan produksi, promosi, dan pengolahan pangan lokal. Selain itu, diperlukan adanya program bantuan pangan pokok berbasis sumber daya lokal untuk masyarakat miskin.

Berbeda dengan hasil analisis data makro, hasil analisis data Patanas menunjukkan bahwa rumah tangga di desa yang berbasis padi sawah, palawija, sayuran, dan perkebunan, proporsi pengeluaran untuk pangannya cenderung meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat konsumsi energi dan protein masih belum memenuhi standar kecukupan yang dianjurkan. Hasil analisis data Patanas juga menunjukkan bahwa sebagian pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga umumnya berasal dari produksi sendiri. Tingkat partisipasi dan konsumsi untuk beras paling tinggi, sedangkan untuk pangan lokal menurun secara drastis.

Upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga pada semua agroekosistem menjadi penting agar mereka dapat hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut dilakukan dengan (1) meningkatkan pendapatan dari usaha pertanian melalui bantuan sarana produksi dan pendampingan teknologi; (2) melakukan diversifikasi usaha di sektor pertanian dan di luar pertanian; (3) menambah kesempatan kerja dan penciptaan tenaga kerja oleh pemerintah/pemerintah daerah dan swadaya; serta (4) meningkatkan kesadaran kepada semua anggota rumah tangga akan pentingnya makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat dan produktif.

Secara nasional NTP menunjukkan kecenderungan meningkat, yang artinya bahwa petani cenderung mengalami surplus karena kenaikan harga produk yang dijual petani lebih besar dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsi yang dibeli petani. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. NTP rata-rata tahun 2010–2014 tertinggi adalah pada subsektor tanaman hortikultura, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan terendah adalah subsektor tanaman pangan. Dalam konteks peningkatan NTP dan kesejahteraan petani, maka pemantapan dan penguatan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan harga output dalam mendukung stabilitas peningkatan produksi dan harga menjadi sangat penting.

Dari hasil analisis data Patanas dapat dikemukakan bahwa nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap biaya produksi dan sewa lahan pada usaha tani jagung meningkat, sedangkan pada usaha tani kedelai dan ubi kayu menurun. Perubahan nilai tukar pendapatan usaha tani komoditas palawija tersebut berkaitan dengan nilai tukarnya terhadap sewa lahan. Penurunan nilai tukar pendapatan terhadap nilai sewa lahan mempunyai implikasi bahwa petani yang tidak mempunyai lahan akan lebih memilih menyakap atau bagi hasil dengan pemilik lahan dibandingkan menyewa lahan guna mengurangi risiko yang dihadapinya. Adapun nilai tukar pendapatan usaha tani terhadap pupuk urea pada komoditas jagung dan ubi kayu menunjukkan peningkatan, sedangkan pada kedelai menunjukkan

penurunan. Kondisi ini perlu diantisipasi untuk mencegah penurunan luas panen dan produksi kedelai.

Secara umum NTP berbasis komoditas pekebunan cenderung meningkat terutama komoditas karet dan komoditas tebu. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis usaha tani beberapa komoditas perkebunan rakyat menghasilkan keuntungan positif, terutama karena peningkatan harga jual hasil produksi perkebunan. Dengan kondisi kecilnya skala pemilikan lahan rumah tangga petani, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan pola usaha tani terpadu. Melalui pengembangan pola usaha tani terpadu akan mengurangi risiko kegagalan produksi danantisipasi terhadap anomali iklim yang semakin sulit diprediksi.

Selama kurun waktu 2003–2013 proporsi penduduk miskin di Indonesia menurun, dengan laju penurunan presentase penduduk miskin di desa lebih besar dibanding di kota. Masih terdapat disparitas jumlah dan presentase penduduk miskin antarprovinsi di Indonesia, di mana proporsi penduduk miskin paling besar terdapat di Pulau Jawa. Analisis kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan juga menunjukkan penurunan selama periode 2003–2013. Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin kecil. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk miskin tersebut bekerja di sektor pertanian, maka sektor pertanian memiliki kontribusi tinggi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB maka semakin tinggi pula perubahan penurunan penduduk miskin di perdesaan.

Sehubungan dengan hal ini, maka hendaknya fokus kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar mempertimbangkan pendekatan holistik multisektoral dan berbasis wilayah/desa miskin tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi daerah potensial. Perlu ada (1) integrasi program pemberdayaan kelompok miskin dan pembangunan ekonomi perdesaan (pembangunan perdesaan inklusif); (2) percepatan transformasi ekonomi (desa-kota dan antarwilayah) dengan sasaran konvergensi tingkat produktivitas; dan (3) modernisasi pertanian dan perdesaan.